

**PERLINDUNGAN SOSIAL INFORMAL SEBAGAI FONDASI
RESILIENSI BENCANA PADA KOMUNITAS KUMUH: STUDI KASUS
DI KELURAHAN NGAMPILAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:
Khidrian Arfiansyah
NIM. 21102050066

Dosen Pembimbing:

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., MSc., Ph.D.
NIP. 198108232009011007

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1357/Un.02/DD/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN SOSIAL INFORMAL SEBAGAI FONDASI RESILIENSI BENCANA PADA KOMUNITAS KUMUH : STUDI KASUS DI KELURAHAN NGAMPILAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHIDRIAN ARFIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21102050066
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., PhD.
SIGNED

Valid ID: 68ae96346c727



Penguji I
Noorkamilah, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 68afc0e65fd10



Penguji II
Abidah Muflihati, S.Th.L., M.Si
SIGNED

Valid ID: 68af087556d5f



Yogyakarta, 31 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Mafuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 68afcc845ef95

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khidrian Arfiansyah
NIM : 21102050066
Judul Skripsi : Perlindungan Sosial Informal Sebagai Fondasi Resiliensi Bencana Pada Komunitas Kumuh: Studi Kasus Di Kelurahan Ngampilan

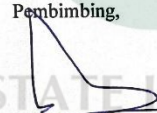
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

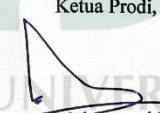
Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 09 Juli 2025

Pembimbing,

Mengetahui:
Ketua Prodi,


Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.
NIP. 198010182009011012


Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.
NIP. 198010182009011012

PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khidrian Arfiansyah
NIM : 21102050066
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

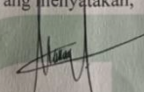
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Strategi Penguatan Resiliensi Masyarakat Kumuh Perkotaan Dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi: Studi Eksplorasi Perlindungan Sosial Informal Kelurahan Ngampilan adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 09 Juli 2025

Yang menyatakan,




Khidrian Arfiansyah
NIM. 21102050066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan hormat, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis, Bapak H. Fathul Arifin, S. Ag., dan Ibu Hj. Haesiah S. Pd. I., yang tercinta. Berkat do'a-do'a yang tidak pernah terputus setiap detik dan setiap langkah anaknya ini, serta dukungan moril dan materil yang tiada hentinya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Kasih sayang bagaikan matahari yang menyinari dunia, kelembutan nasehat bagaikan siraman air pada tumbuhan, dan do'a yang tidak pernah putus bagaikan air mengalir dari hulu ke hilir yang menjadikan penulis kuat, semangat, dan mampu bertahan sampai selesai.

Kepada kedua saudara saya yang tercinta, Witria Lail Arfiansyah selaku kakak saya, dan Rizqi Arrajibi Arfiansyah, adek saya. Terimakasih tiada henti terucap kepada mereka berdua yang selalu menemani langkah penulis dari awal berangkat belajar dari kampung sana sampai penulis dapat menyelesaikan studi ini di tanah orang. Teruntuk seluruh keluarga besar saya yang ada di Lombok Timur, kalau tidak ada mereka, mungkin sulit penulis akan bertahan sampai sekarang, maka *maturtampiasih* penulis ucapkan. Kepada orang-orang yang tersayang, terimakasih sudah selalu mendukung dan menjadi tumpuan penulis ketika sedang jatuh.

Semoga skripsi ini menjadi manfaat seterusnya bagi penulis, orang terkasih, dan yang membacanya sampai seterusnya. Walaupun penulis sadar banyak kekurangan di dalamnya, tapi penulis berharap ini menjadi bukti sejarah bagi penulis sendiri kelak ketika sudah mencapai kesuksesan.

MOTTO

Janganlah melarikan diri dari kesulitan, tetapi hadapilah dengan keberanian.

Tantangan adalah batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik

(Marcus Aurelius)

Aku dan sepi saling menguatkan, biarlah orang lain bicara apa saja. Aku harus menemukan diriku sendiri sebelum berbicara soal dunia.

(Soren Kierkegaard)

Ketika kehidupan melemparkanmu ke dalam badai, jangan pernah berharap badai itu akan mereda, haraplah bahwa dirimu yang akan menjadi kuat.

(Seneca)

Hargailah setiap orang yang mendukung prosesmu sebagai manusia, daripada terobsesi pada jutaan ucapan selamat atas keberhasilanmu.

(Penulis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Perlindungan Sosial Informal Sebagai Fondasi Resiliensi Bencana Pada Komunitas Kumuh: Studi Kasus Di Kelurahan Ngampilan

Sholawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga lantunan sholawat yang selalu kita ucapkan setiap harinya dan menemani penulis selama mengerjakan skripsi ini dapat menjadi bagian dari jiwa ini dan mengantarkan kita mendapatkan syafa'atnya kelak di hari pembalasan.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat strata satu di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tentunya masih cukup jauh dari kata sempurna secara naskah maupun akademik. Upaya dan usaha yang penulis lakukan tentunya mengharapkan tugas ini selesai dengan baik, terlepas dari banyaknya cobaan dan hambatan yang penulis temukan. Namun, berkat saran, kritik, serta dorongan semangat dari berbagai pihak, Alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Maka dengan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menjalani studi hingga akhir di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan baik.
3. Kepada segenap jajaran Direktur Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Bapak Direktur, beliau Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag., penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih karena telah diberi kesempatan dan kepercayaan menjadi penerima beasiswa dari Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama Republik Indonesia angkatan 2021, dengan didukung dan dibiayai penuh baik biaya institusi maupun biaya hidup selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga tuntas
4. Ibu Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si., selaku pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas bimbingan, dukungan, do'a, serta dorongan yang telah diberikan kepada penulis dari awal menjadi mahasiswa baru sampai penulis dapat menyelesaikan studi sebagai salah satu awardee PBSB di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Muhammad Izzul Haq, S. Sos., M. Sc., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Satu sisi juga sebagai

dosen pembimbing penulis. Terimakasih atas segala dukungan, kritik, saran dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian, sehingga proses dari awal penulis membuat proposal sampai pada akhirnya tugas akhir ini selesai dengan baik.

6. Kepada Ibu Istikhomah, S.E., selaku Lurah di Kelurahan Ngampilan. Terimakasih dihaturkan karena telah mengizinkan, menerima dengan penuh hangat bahkan mempersilahkan penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Ngampilan.
7. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Fathul Arifin, S.Ag., dan Ibu Haesiah, S.Pd.I., yang telah berkorban begitu banyak, baik material maupun spiritual, mendukung penulis, mendo'akan di setiap sujudnya hingga selesainya Tugas Akhir ini.
8. Keluarga penulis yang membantu dari segi waktu, doa dan material.
9. Keluarga besar CSSMoRA (*Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs*) yaitu wadah bagi para penerima beasiswa santri berprestasi, penulis haturkan terimakasih banyak karena sudah menjadi rumah dan ruang rumbuh dan belajarnya penulis tentang berbagai hal. Terkhusus Kabinet Wiradhana dan keluarga besar CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga dari angkatan 2021 sampai angkatan 2024 yang tercinta dan tersayang.
10. Kepada keluarga kedua penulis di Yogyakarta, Aksata tercinta dan terkasih. Terimakasih sudah ada dan terus mendukung penulis dari awal menjadi mahasiswa baru, menerjang lika-liku, susah senang, bahagia dan sedihnya bareng-bareng, berantem dan bercanda menjadi dinamika perjalanan penulis

yang penuh bahagia.

11. Kepada seluruh jiwa yang terkasih dan tersayang, yang selalu mengirimkan do'a-do'a dan segala bentuk dukungan. Dari yang penulis tau sampai jiwa anonim. Terimakasih penulis haturkan dengan kasih yang terdalam dan dengan sayang yang terluapkan.
12. Rekan-rekan seperjuangan di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial 2021, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritikan dan saran yang bersifat membangun tentunya sangat dibutuhkan untuk kemajuan berpikir dan perkembangan dialog akademik. Akhirnya Penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membaca. Terlepas dari kekurangan yang ada.

Yogyakarta, 28 Agustus 2025

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Komunitas kumuh perkotaan seperti Kelurahan Ngampilan menghadapi kerentanan ganda berupa permasalahan kekumuhan dan risiko bencana hidrometeorologi yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perlindungan sosial informal sebagai fondasi resiliensi bencana dalam komunitas kumuh perkotaan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan sosial informal berupa gotong royong, jaringan sosial antarwarga, dan keberadaan Kampung Tangguh Bencana (KTB) memiliki peranan vital pada setiap fase bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Analisis dengan enam komponen resiliensi Ganor dan Lavy (2003) memperlihatkan bahwa praktik tersebut mampu memperkuat komunikasi, membangun kerja sama, serta meningkatkan kohesi sosial yang efektif dalam menghadapi situasi krisis. Namun, resiliensi yang terbentuk bersifat rapuh (*precarious resilience*) karena keterbatasan sumber daya, ketidakpastian dukungan eksternal, dan tingginya ketergantungan pada solidaritas lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara sistem perlindungan sosial informal yang tumbuh dari masyarakat dengan dukungan perlindungan sosial formal pemerintah untuk mewujudkan resiliensi komunitas yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Resiliensi Komunitas, Kawasan Kumuh, Perlindungan Sosial Informal, Bencana, Kampung Tangguh Bencana*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Urban slum communities, such as Ngampilan Village, face dual vulnerabilities: deteriorating slum conditions and increasing risks of hydrometeorological disasters. This study aims to examine the role of informal social protection as a foundation for disaster resilience in urban slum communities. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that informal mechanisms, including mutual aid practices, neighborhood social networks, and the Disaster-Resilient Village (KTB) initiative, play a crucial role across disaster phases: pre-disaster preparedness, emergency response, and post-disaster recovery. An analysis using Ganor and Lavy's (2003) six components of resilience demonstrates that these practices strengthen communication, foster cooperation, and enhance social cohesion, which are vital during crises. Nevertheless, the resilience developed remains precarious due to limited resources, uncertainty of external support, and heavy reliance on local solidarity. This study emphasizes the importance of synergy between bottom-up informal protection systems and formal government interventions to create sustainable community resilience, especially in urban slum areas where poverty and disaster risks converge.

Keywords: *Community Resilience, Slum Areas, Informal Social Protection, Disasters, Disaster-Resilient Village*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	19
1. Deskripsi Teori.....	19
a. Teori Perlindungan Sosial Formal	19
b. Perlindungan Sosial Informal.....	22
c. Teori Resiliensi	27

d. Teori Manajemen Bencana	30
2. Relevansi Teori	35
F. Metode Penelitian.....	41
1.Lokasi Penelitian.....	41
2.Jenis Penelitian dan Studi	41
3.Subjek dan Objek Penelitian.....	42
4.Metode Pengumpulan data.....	44
5.Analisa Data.....	45
6.Teknik Keabsahan Data	46
G. Sistematika Pembahasan.....	47
BAB II	50
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	50
A. Profil Kelurahan Ngampilan.....	50
1.Letak Geografis dan Sejarah Kelurahan Ngampilan	50
2.Struktur Organisasi Kelurahan Ngampilan	53
3.Visi dan Misi Kelurahan Ngampilan	54
4.Demografi dan Topografi Kelurahan Ngampilan	55
5.Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Ngampilan	57
B. Karakteristik Kawasan Kumuh dan Riwayat Serta Risiko Kebencanaan 58	
1.Karakteristik Kawasan Kumuh Kelurahan Ngampilan.....	58
2.Risiko dan Riwayat Kebencanaan Kelurahan Ngampilan	62
C. Kampung Tangguh Bencana (KTB) Kampung Ngampilan.....	65
1.Sejarah dan Fungsi KTB Kampung Ngampilan	66

2. Pola Koordinasi dan Program	67
BAB III.....	71
HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Kondisi Awal Masyarakat Kumuh di Kelurahan Ngampilan.....	72
1. Karakteristik Fisik, Geografis, dan Profil Kerentanan.....	72
2. Struktur Sosial-Ekonomi dan Jaringan Sosial.....	76
B. Tahapan Perlindungan Sosial Informal dalam Fase Bencana	79
1. Tahap Prabencana: Kesiapsiagaan dan Mitigasi Berbasis Komunitas.....	79
2. Tahap Tanggap Darurat: Solidaritas dan Mobilisasi Sumber Daya Lokal	85
3. Tahap Pascabencana: Gotong Royong dalam Pemulihan Awal	88
C. Dampak Perlindungan Sosial terhadap Resiliensi Komunitas	91
1. Analisis Resiliensi Komunitas Berdasarkan Enam Komponen Ganor dan Lavy (2003).....	91
2. Tinjauan Kritis: Resiliensi yang rentan (<i>Precarious Resilience</i>).....	95
BAB IV	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Perlindungan Sosial Formal dan Informal	25
Tabel 2. 2 Kriteria Kawasan Kumuh dan Verifikasi di Kelurahan Ngampilan	60
Tabel 2. 3 Tabel Klasifikasi Tingkat Kawasan Kumuh	61
Tabel 2. 4 Tabel Risiko Kebencanaan Kelurahan Ngampilan	63
Tabel 2. 5 Riwayat Kebencanaan Kelurahan Ngampilan dalam Beberapa Tahun/Periode	63
Tabel 3. 1 Matriks Kegiatan Kesiapsiagaan Informal di Kelurahan Ngampilan ..	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Tahapan Manajemen Bencana	32
Gambar 2. 1 Kantor Kelurahan Ngampilan	52
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kelurahan Ngampilan	53
Gambar 2. 3 Gambar Pemukiman di Ngampilan dan Tepi Sungai Winogo	59
Gambar 2. 4 Bencana Longsor di RW 01/RT 05 Kelurahan Ngampilan.....	62
Gambar 2. 5 Pola Koordinasi Lintas Sektor KTB.....	68
Gambar 2. 6 Program Senam dan Sosialisasi Kebencanaan KTB Purwodiningratan	69
Gambar 3. 1 Penyuluhan Penanggulangan Kebarakan di Kelurahan Ngampilan...	80
Gambar 3. 2 Rapat Formal Strategi Penanggulangan Kebencanaan.....	82
Gambar 3. 3 Koordinasi Kelurahan dengan KTB.....	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi. Posisi geografisnya yang berada di pertemuan lempeng tektonik serta di wilayah tropis menyebabkan negara ini rentan terhadap berbagai ancaman bencana. Baik geologis maupun hidrometeorologis. Data dari *World Risk Report* dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024 menempatkan Indonesia pada urutan kedua dari 193 negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia.¹ Risiko ini terkonfirmasi oleh data nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan sebanyak 5.400 kejadian bencana pada tahun 2023, dan sebagian besar (sekitar 99%) merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.²

Indonesia juga dinobatkan sebagai salah satu negara paling rawan bencana. Menurut *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)*, Indonesia menduduki urutan ke-7 di antara negara-negara yang rawan bencana. Kenyataan terus menunjukkan bagaimana Indonesia tetap rentan terhadap bencana baik yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lainnya maupun non alam seperti banjir, penyakit menular, kebakaran hutan dan lainnya,

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024*, 2024, https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buku_BNPB/BUKU_IRBI_2024_BNPB_lowres.pdf.

² Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2023* (BNPB, 2023), <https://www.bnpb.go.id/buku/buku-data-bencana-indonesia-tahun-2023>.

serta bencana sosial berupa konflik sosial di berbagai daerah. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial politik seperti jumlah penduduk, faktor ekonomi, kemiskinan, lingkungan yang semakin rusak, perubahan iklim tersebut mengakibatkan kerentanan makin meningkat. Keadaan diperparah dengan banyak terjadinya bencana yang bersifat lokal, berskala kecil dan sedang, sehingga tidak selalu mendapat perhatian secara nasional apalagi internasional.³

Namun, dampak bencana tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat miskin yang tertinggal di kawasan kumuh perkotaan menjadi salah satu pihak yang paling rentan. Bagi mereka, bencana tidak hanya membawa kerugian fisik tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi dan sosial yang telah rapuh sebelumnya. Kehilangan tempat tinggal, sumber mata pencaharian, serta meningkatnya beban ekonomi menjadi pemicu yang memperdalam lingkaran kemiskinan.⁴

Kerentanan merupakan salah satu isu yang masih menjadi fokus diskursus masalah kesejahteraan, hubungan kausalitas permasalahan sosial di masyarakat tidak lepas dari kaitan kerentanan sosial, salah satunya adalah keterkaitan antara kerentanan sosial pada masyarakat kumuh perkotaan yang rawan jatuh miskin ataupun mendapati kehidupan yang tidak layak dengan peran vital perlindungan sosial kepada mereka sebagai strategi manajemen bencana. Hal ini menjadi isu

³ Tukino, "Pekerjaan Sosial Dalam Setting Kebencanaan," *Share* 3, no. 2 (2013).

⁴ Rizka Pranandari, Kahar Shuzuran, and Muhammad Wibowo, "Pengaruh Indeks Risiko Bencana, PDRB Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Wilayah Berdominasi Perkotaan Di Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2020," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5 (June 30, 2022): 14–34, <https://doi.org/10.52266/jesa.v5i1.758>.

penting untuk diteliti lebih lanjut, karena tiga variabel tersebut memiliki tingkat kausalitas yang erat dan memiliki hubungan yang solid dalam membentuk kondisi konstruksi sosial yang adil bagi masyarakat, khususnya daerah kumuh.⁵

Kerentanan sosial menggambarkan kerapuhan sosial dari suatu wilayah akibat pengaruh dari adanya bahaya, ancaman dan bencana yang memiliki potensi merusak, mengganggu serta merugikan. Kerentanan sosial wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial seperti karakteristik demografi wilayah, karakteristik sosial ekonomi wilayah, jaringan sosial atau masyarakat dan jaringan politik serta sistem kelembagaan wilayah. Suatu wilayah yang memiliki kondisi sosial yang rentan, maka akan menimbulkan dampak kerugian yang besar ketika menghadapi ancaman atau bencana.⁶

Kerentanan menurut Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia adalah suatu kondisi yang mengakibatkan ketidakmampuan individu atau sekelompok orang terhadap sebuah ancaman yang terjadi. Sedangkan kerentanan sosial adalah kerugian yang dapat ditimbulkan oleh buruknya kondisi sosial yang menentukan sejauh mana kehidupan dan mata pencaharian individu terancam oleh suatu kejadian tertentu yang dapat diidentifikasi baik dari kesehatan, kondisi alam, ataupun masyarakat itu sendiri. Kerentanan sosial mengacu pada tingkat risiko atau

⁵ Wahyu Saputra, Sukmaniar, and Muhammad Hapiz Hermansyah, "Permukiman Kumuh Perkotaan: Penyebab, Dampak Dan Solusi," *Environmental Science Journal (Esjo) : Jurnal Ilmu Lingkungan* 1, no. 1 (2022): 12–17, <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929>.

⁶ Nisakhaira dan Sih Setyono Jawoto Rahmaningtyas, "Tingkat Kerentanan Sosial Wilayah Kabupaten Wonogiri," *Teknik PWK* 2, no. 4 (2013): 895–904, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>.

kerentanan yang dihadapi individu dan komunitas karena kondisi sosial mereka yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan kondisi di sekitarnya.⁷

Tingkat kerentanan sosial menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya (*hazards*). Pada kondisi sosial yang rentan maka jika terjadi bencana dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian yang besar. Tingkat kerentanan tinggi jika tingkat risiko yang muncul/dihasilkan bernilai besar akibat adanya bahaya. Oleh karena itu, suatu sistem perlu memiliki kapasitas ketahanan/penanggulangan yang tinggi dalam merespon bahaya agar tingkat risiko yang muncul bernilai kecil.⁸

Permasalahan kawasan kumuh semakin memperparah kerentanan tersebut. Urbanisasi yang pesat di kota-kota besar Indonesia, termasuk Yogyakarta, seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Akibatnya, muncul kantong-kantong permukiman kumuh yang menjadi wajah kerentanan perkotaan. Menurut definisi pemerintah, permukiman kumuh dicirikan oleh ketidakaturan bangunan, kepadatan yang sangat tinggi, serta kualitas sarana dan prasarana dasar seperti jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat.

Daerah kumuh perkotaan merupakan salah satu konteks riil adanya kerentanan sosial terlihat dengan mata telanjang. Karena masyarakat di daerah kumuh perkotaan memiliki fasilitas umum yang tidak memadai, bangunan rumah

⁷ Jasmine Cassy Mah et al., "Social Vulnerability Indices: A Scoping Review," *BMC Public Health* 23, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16097-6>.

⁸ Rahmaningtyas, "Tingkat Kerentanan Sosial Wilayah Kabupaten Wonogiri."

yang padat dan tidak layak huni merupakan ciri dari permukiman kumuh itu sendiri.⁹ Wilayah tersebut rentan akan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Kerentanan yang terjadi melibatkan faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi.¹⁰ Bencana alam seperti terjadinya banjir dan bencana sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas adalah kerawanan yang dapat terjadi di permukiman kumuh, hak tersebut karena akses dan aset yang mereka miliki terbatas dari yang lainnya.¹¹ Sehingga perlu adanya suatu konsep yang fokus dalam manajemen bencana.

Dalam konteks resiliensi komunitas dalam menghadapi kebencanaan, konsep tersebut perlu menjadi strategi untuk mengetahui secara mendalam peran vital dari perlindungan sosial informal bagi masyarakat kumuh perkotaan yang rentan atau memiliki risiko sosial. Menurut Permensos Nomor 10 Tahun 2020, risiko sosial adalah ancaman penurunan kesejahteraan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena mengalami guncangan dan kerentanan sosial yang meliputi siklus hidup, lingkungan ekonomi, dan sosial sehingga menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial.¹²

⁹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016," 66 § (2016).

¹⁰ Sukmaniar, A J Pitoyo, and A Kurniawan, "Vulnerability of Economic Resilience of Slum Settlements in the City of Palembang," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 451, no. 1 (2020): 12106, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/451/1/012106>.

¹¹ Sukmaniar, A J Pitoyo, and A Kurniawan, "Deviant Behaviour in the Slum Community of Palembang City," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 683, no. 1 (2021): 12129, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012129>.

¹² Kementerian Sosial, "Permensos Nomor 10 Tahun 2020," 2017 § (2020), <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>.

Daerah kumuh perkotaan Kota Yogyakarta sampai Agustus tahun 2024 masih menyentuh angka 80,94 hektar mengutip dari liputan rri.co.id yang telah mewawancarai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Hartono saat *Kick Off Meeting* Kelompok Kerja (Pokja) dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Prawirotaman, Selasa (6/8/2024).¹³

Pada penelitian ini, lokasi daerah kumuh yang rentan bencana di daerah perkotaan Yogyakarta adalah Kelurahan Ngampilan. Menurut sumber data dari Sadali, Kelurahan ngampilan merupakan salah satu dari dua kelurahan yang ada di Kecamatan Ngampilan yang merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan masalah ganda, yaitu permukiman kumuh dan kerentanan bencana hidrometeorologi.¹⁴

Lokasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Ngampilan dapat ditemukan pada dua kelurahan, yaitu Kelurahan Ngampilan dan Notoprajan. Pada dua kawasan tersebut, terdapat kawasan permukiman kumuh dengan luasan total 13,51 Hektar dengan total lima jumlah RW yang teridentifikasi di kawasan Kelurahan Ngampilan, diantaranya adalah RW 1, 2, 9, 11, dan 12. Sedangkan di sebelahnya, Kelurahan Notoprajan terdapat empat RW yang teridentifikasi kawasan permukiman kumuh, yaitu RW 1 sampai 4. Dua kelurahan tersebut, secara

¹³Dyan Purwanto, "Luasan Kawasan Kumuh Kota Yogyakarta Masih 80 Hektar," rri.co.id, <https://www.rri.co.id/daerah/884717/luasan-kawasan-kumuh-kota-yogyakarta-masih-80-hektar> diakses pada tanggal 18 Januari 2025

¹⁴ Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, and Rifan Andika, "Asosiasi Dan Distribusi Spasial Permukiman Kumuh Di Kota Yogyakarta," *Media Komunikasi Geografi* 20, no. 2 (2019): 173, <https://doi.org/10.23887/mkg.v20i2.21102>.

geografis dekat dengan pusat perkotaan Yogyakarta dan juga Sungai Winongo, yang artinya rawan terdampak siklus cuaca atau bencana hidrometeorologi.¹⁵

Salah satu bencana yang paling dikhawatirkan dan sering terjadi di kawasan Kota Yogyakarta adalah bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi sendiri di Yogyakarta pada tahun 2024 memiliki data yang cukup signifikan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DI Yogyakarta Noviar Rahmad menuturkan bahwa sejak 24 November sampai 2 Januari 2025, Yogyakarta telah masuk pada level siaga darurat bencana hidrometeorologi. Dari data yang disampaikan, sampai pada bulan Oktober 2024, BPBD telah mencatat 262 kejadian cuaca ekstrem dan sebanyak 27 bencana banjir selama tahun 2024, disusul dengan bencana longsor yang terjadi di 377 titik¹⁶

Data yang tersajikan di atas merupakan gambaran bahwa perkotaan Yogyakarta sangat rentan terhadap bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Terlepas dari kerentanan bencana tersebut, beberapa wilayah kota juga masuk pada kategori beban ganda, bahkan mungkin masuk pada kategori beban kompleks, artinya ada kerentanan yang menambah risiko kehidupan mereka. Salah satu kerentanan yang dimaksud adalah kawasan kumuh di wilayah perkotaan, mereka memiliki akses dan aset yang terbatas dalam mencukupi kehidupan, lalu ditambah dengan ancaman keamanan terhadap bencana, terutama di kawasan yang rentan, salah satunya adalah Kampung Ngampilan yang dekat dengan Sungai Winongo.

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Adji G Rinepta, "Curah hujan DIY Masih Tinggi, Siaga Bencana Hidrometeorologi Diperpanjang," [www.detik.com](https://www.detik.com/jogja/berita/d-7720181/curah-hujan-diy-masih-tinggi-siaga-bencana-hidrometeorologi-diperpanjang), <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7720181/curah-hujan-diy-masih-tinggi-siaga-bencana-hidrometeorologi-diperpanjang> diakses pada tanggal 19 Januari 2025.

Maka, beban ganda tersebut perlu menjadi fokus perhatian tetnang perlindungan yang akan didapatkan, tentu dengan kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.¹⁷

Dalam penanggulangan bencana pendekatan formal yang bersifat *top-down* atau terpusat seringkali menghadapi tantangan terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat paling cepat dan efektif. Keterbatasan sumber daya prosedur birokrasi, dan kurangnya pemahaan mengenai konteks sosial lokal dapat menciptakan kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan lapangan.¹⁸

Untuk mengisi kesenjangan ini, masyarakat seringkali mengandalkan mekanisme pertahanan mereka sendiri. Di tengah keterbatasan, komunitas mengembangkan sistem perlindungan sosial informal yang berakar pada nilai-nilai kebersamaan. Praktik seperti gotong royong, jaringan sosial antar tetangga, arisan, serta peran aktif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menjadi jaring pengaman pertama saat terjadi krisis.¹⁹ Inisiatif ini kemudian diperkuat melalui program berbasis komunitas seperti Kampung Tangguh Bencana (KTB) di wilayah Kelurahan Ngampilan untuk meningkatkan kapasitas kemandirian masyarakat

¹⁷ Chrisdawati Angrelia et al., "Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir Tahun 2020," *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 2020, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:225755041>.

¹⁸ Waluyo Handoko, "Menjaga Sustainability Pengembangan Masyarakat Pesisir Kebumen : Antara Corak Top-Down, Partisipatif Dan Inisiasi Kelembagaan Lokal," *Sosiohumaniora* 19, no. 3 (2017): 244–52, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.10291>.

¹⁹ Humas BAZNAZ RI, "BAZNAS Ajak Masyarakat Gotong Royong Bantu Korban Terdampak Bencana Di Indonesia," 2024, https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Gotong_Royong_Bantu_Korban_Terdampak_Bencana_di_Indonesia/1999. diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

untuk menghadapi ancaman bencana.²⁰ Di Kelurahan Ngampilan, kolaborasi antara aparat dan anggota KTB dalam menangani pohon tumbang akibat cuaca ekstrem menunjukkan bagaimana inisiatif komunitas ini berfungsi secara nyata di lapangan.²¹

Fenomena ini menegaskan bahwa resiliensi bencana sebuah komunitas tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal atau kekuatan infrastruktur fisik. Resiliensi yang didefinisikan sebagai kapasitas sistem atau komunitas untuk beradaptasi dan pulih dari guncangan bencana sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal. Teori resiliensi komunitas menyoroti pentingnya perlindungan sosial informal, yang mencakup ketersediaan jaringan sosial, tingkat pengetahuan, dan adanya kepercayaan antarwarga dan dengan pemimpin lokal, sebagai faktor utama pembentuk resiliensi.²²

Di sisi lain, teori perlindungan sosial yang dikemukakan oleh lembaga seperti Bank Dunia dan ILO (*International Labour Organization*) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai serangkaian kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan terhadap berbagai guncangan. Ketika sistem perlindungan sosial formal belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sistem informal yang berbasis komunitas mengambil peran krusial. Namun, mekanisme informal

²⁰ BPBD DIY, "DESTANA Dan SPAB," 2019, <https://bpbd.jogjaprov.go.id/spab-dan-destana>. diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

²¹ Wahyu Rendi, "Polsek Ngampilan Bersama Kampung Tanggap Bencana Evakuasi Pohon Tumbang Di Jalan K.H. Ahmad Dahlan," *Tribrata News*, 2025, Polsek Ngampilan Bersama Kampung Tanggap Bencana Evakuasi Pohon Tumbang di Jalan K.H. Ahmad Dahlan. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2025.

²² Anita Novianty, "Penyesuaian Dusun Jangka Panjang Ditinjau Dari Resiliensi Komunitas Pasca Gempa," *Jurnal Psikologi* 38, no. 1 (2011): 30–39.

yang menjadi tulang punggung pertahanan masyarakat di kawasan rentan ini seringkali luput dari perhatian dalam kajian kebencanaan perkotaan yang lebih fokus pada aspek teknis dan intervensi formal.²³

Berdasarkan uraian di atas, teridentifikasi beberapa celah penelitian yang signifikan. Pertama, masih sedikit penelitian yang secara spesifik memposisikan perlindungan sosial informal sebagai fondasi utama resiliensi bencana, khususnya dalam konteks kawasan kumuh perkotaan yang padat. Kedua, studi kebencanaan yang ada cenderung berfokus pada peran dan efektivitas sistem formal yang diinisiasi pemerintah (seperti BPBD atau Dinas Sosial), dan kurang mengeksplorasi kekuatan serta keterbatasan sistem yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Ketiga, belum banyak studi yang mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme informal seperti gotong royong, arisan, atau jaringan kekerabatan bekerja secara konkret di beberapa fase bencana mulai dari mitigasi dan kesiapsiagaan (prabencana). Respons (saat bencana), hingga pemulihan (pasca bencana).

Menyadari adanya kesenjangan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, mekanisme, kapasitas, serta batasan dari sistem perlindungan sosial informal sebagai fondasi resiliensi bencana pada komunitas kumuh perkotaan dengan mengambil studi kasus di Kelurahan Ngampilan, Kota Yogyakarta.

²³ International Labour Organization, "The World Bank Group and ILO Universal Social Protection Initiative," International Labour Organization, 2015, <https://www.ilo.org/resource/world-bank-group-and-ilo-universal-social-protection-initiative>. diakses pada tanggal 5 Agustus 2025

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak perlindungan sosial informal dalam memperkuat resiliensi komunitas masyarakat kumuh di Kelurahan Ngampilan dalam *setting* bencana?”

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengubah pertanyaan penelitian dalam bentuk pernyataan sesuai dengan teori yang digunakan. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara keilmuan penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengeksplorasi konsep perlindungan sosial bagi masyarakat yang memiliki kerentanan sosial di daerah kumuh perkotaan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menawarkan konsep strategi baru dalam manajemen bencana perkotaan yang berbasis pada kapital sosial dan perlindungan sosial serta memberikan gambaran bagaimana seharusnya masyarakat rentan di daerah kumuh perkotaan mendapatkan hak perlindungannya sebagai bentuk mitigasi non-teknis bencana perkotaan.

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini seharusnya memandang ke belakang untuk melihat berbagai sudut pandang dan strategi penelitian sebelumnya untuk memetakan

beberapa literatur dari sebagai acuan pada kecenderungan perlindungan sosial dalam strategi manajemen kebencanaan. Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nana Mulayanan et al, tentang strategi kebencanaan, institusi sosial dan pemerintahan dengan menggunakan metode *normative legal research* yang terbit pada tahun 2023 tentang Peraturan Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang manajemen bencana menunjukkan bahwa regulasi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital. Dalam acuan mitigasi, pemerintah memegang peran pada tingkat atas dan tahap awal, yaitu pada tahapan kebijakan. Kebijakan pemerintah berbentuk regulasi sangat penting untuk membantu resiliensi masyarakat yang rentan terhadap bencana, karena bagaimana pun sumber yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat adalah institusi sosial ataupun negara itu sendiri. Institusi tersebut harus cakap meregulasi tentang penanggulangan bencana, mencakup fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Regulasi tersebut harus difokuskan untuk *social protection* bagi masyarakat sebagai sumber resiliensi, sebagai representatif perlindungan sosial sebagai salah satu strategi manajemen bencana yang patut diperhitungkan.²⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nana Mulayanan et al dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada strategi penanganan mitigasi bencana, menunjukkan tahapan-tahapan mitigasi bencana, lalu kemudian menunjukkan hubungan penting perlindungan sosial sebagai salah satu fokus pada

²⁴ Nana Mulayana et al., "Legal Analysis of Social Protection in Disaster Management in the Province of Lampung" 2023 (2023): 624–34, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13027>.

strategi mitigasi bencana, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Nana Mulayanan et al yakni terletak pada tema dan subjek pembahasan penelitian. Penelitian Nana Mulayanan et al fokus pada kajian hierarki hukum dan peran vital regulasi dalam mitigasi bencana serta dampaknya pada masyarakat. Kebijakan pemerintah menjadi perhatian khusus dalam penelitian Nana Mulyanan et al walaupun sedikit menyinggung tentang perlindungan sosial, serta pengaturan lokus penelitian yang tidak menunjukkan kriteria khusus seperti wilayah kumuh perkotaan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus membedah perlindungan sosial sebagai strategi mitigasi bencana pada pengaturan lokus penelitian khusus di wilayah kumuh perkotaan Yogyakarta tepatnya di Kampung Winongo.

Kedua, ketika berbicara tentang masyarakat kumuh perkotaan yang rentan terhadap bencana, maka tidak lepas dengan hubung-kait dengan imigran. Buku yang berjudul *Migrant Urban Settlements and Disaster Management* yang ditulis oleh Gaurika Chugh menjelaskan tentang konteks tersebut, salah satu studi dalam buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang konteks spesifik dan kerentanan komunitas migran di daerah perkotaan dan mengadvokasi pendekatan yang disesuaikan dalam kesiapsiagaan bencana, penilaian risiko, dan pembangunan ketahanan untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan unik mereka. Makalah ini berfokus pada kerentanan komunitas migran di daerah perkotaan dan menekankan perlunya pendekatan yang disesuaikan dalam manajemen risiko bencana.²⁵

²⁵ Gaurika Chugh, "Migrant Urban Settlements and Disaster Management," in *International Handbook of Disaster Research*, ed. Amita Singh (Singapore: Springer Nature Singapore, 2022), 1–10, https://doi.org/10.1007/978-981-16-8800-3_205-1.

Persamaan penelitian ini dengan buku Gaurika Chugh yakni terletak pada konteks pembahasan tentang komunitas/masyarakat rentan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, kemudian adanya perhatian khusus terhadap komunitas rentan tersebut dengan rekomendasi-rekomendasi yang berimplikasi pada ketahanan mereka terutama dalam menghadapi bencana. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan buku Gaurika Chugh adalah fokus komunitas rentan yang sedikit berbeda, Gaurika memandang khusus pada imigran sebagai komunitas rentan, sedangkan penelitian ini fokus pada masyarakat kumuh sekaligus rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Aziz Masyhuri et al, Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. Tanah longsor merupakan bencana tahunan yang sering terjadi di Kota Semarang, dalam artikel ini mengulas dari sisi stakeholder setempat, bagaimana peran dari stakeholder tersebut dan apa saja dampak yang bisa diberikan dalam manajemen bencana longsor di kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi yakni pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan juga sektor swasta, namun dalam prosesnya koordinasi yang dilakukan oleh ketiga stakeholders tersebut kurang berjalan dengan efektif sehingga menghambat kegiatan manajemen bencana. Akibat dari kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan bencana tanah longsor di Kota Semarang belum tertangani dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang belum berjalan dengan optimal karena kurangnya koordinasi dan

minimnya peran serta dari stakeholders lain yang ada di luar sektor pemerintah sehingga menyebabkan bencana tanah longsor masih sering terjadi.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz Masyhuri et al adalah fokus bencana pada bencana hidrometeorologi dalam satu wilayah. Serta penelitian ini menggunakan pendekatan metode yang sama, yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tema penelitiannya yang berujuk pada peran stakeholder dalam penanganan bencana, sedangkan penelitian ini fokus pada eksplorasi strategi perlindungan sosial sebagai penguat resiliensi bagi masyarakat yang rentan terdampak bencana di wilayah kumuh.

Keempat, manajemen bencana tentunya tidak lepas dari kesiapsiagaan komunitas dan masyarakat dalam menghadapinya, salah satu strateginya adalah dengan pelatihan dan simulasi bencana. Salah satu penelitian tentang efektivitas dari pelatihan dan simulasi kebencanaan yang telah dikemukakan oleh Satriya Pranata et al, dalam penelitiannya mencoba mengulas dampak pelatihan tersebut terhadap anak sekolah setempat dalam menghadapi bencana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melakukan pelatihan dan simulasi tentang bencana akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kesiapsiagaan bencana bagi para guru disekolah. Kajian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat kesiapsiagaan bencana SDN 1 Banyuroto setelah diberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana termasuk dalam kategori siap dan dengan penerapan metode simulasi yang disertai dengan penggunaan media pelatihan kebencanaan yang mempengaruhi tingkat

²⁶ Aziz Masyhuri et al., “Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4 (October 24, 2021): 854–62, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.759>.

kesiapsiagaan bencana. Studi ini menunjukkan bahwa pelatihan kesiapsiagaan bencana dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di SDN 1 Banyuroto dengan menggunakan model *hands-on* yang mensimulasikan tindakan seperti saat terjadi bencana.²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Satriya Pranata ada di tema penelitiannya yang sama-sama membahas tentang manajemen bencana atau upaya mitigasi bencana. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang memiliki aturan tempat yang berbeda, perbedaan selanjutnya terletak pada metode penelitian Satriya yang menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif. Sudut pandang dalam manajemen bencana dari penelitian Satriya dkk masih bersifat teknis seperti pelatihan, sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang perlindungan sosial dan resiliensi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Puji Harsanto et al, tentang Peningkatan Kapasitas Desa dalam Pengurangan Risiko Bencana Longsor Tebing Studi Kasus Sungai Winongo Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan model survei lapangan untuk mengamati kondisi fisik tebing sungai. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar masyarakat telah memiliki kemampuan kesadaran tentang risiko longsor, akan tetapi kurang dukungan dari segi infrastruktur yang memadai. Sebanyak

²⁷ Satriya Pranata et al., "Pengaruh Pelatihan Dan Simulasi Manajemen Bencana Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Kesiapsiagaan Bencana Di Sekolah Dasar Negeri 1 Banyuroto Magelang," *Journal Nursing Research Publication Media (NURSEPEDIA)* 2 (November 29, 2023): 148–55, <https://doi.org/10.55887/nrpm.v2i3.45>.

46,99% Desa masih belum memiliki alokasi dana untuk mitigasi bencana, dan 69,88% belum memiliki sistem peringatan dini. Hasil dari penelitian pengabdian ini juga menekankan pada kebutuhan mendesak akan penguatan sistem peringatan dini, dan optimalisais alokasi dana untuk mitigasi bencana.²⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Puji Harasanto et al dengan penelitian ini adalah pada pembahasan bencana hidrometeorologi dan masih satu kawasan lokus penelitian yaitu di bantaran Sungai Winongo. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan tema spesifik penelitian. Puji dkk fokus pada mitigasi risiko bencana dengan menggunakan perspektif pemahaman masyarakat terhadap bencana, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi penguatan resiliensi masyarakat dari bentuk perlindungan sosial.

Keenam, terkait perlindungan sosial bagi kelompok rentan, mengutip penelitian yang dilakukan oleh Puspa Dewi Amanda et al, yang berjudul Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis efektivitas program perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa program perlindungan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, akan tetapi terdapat keterbatasan dalam mencapai tujuan program tersebut. Adapun faktor pendorong dari kerentanan

²⁸ Puji Harsanto et al., “Peningkatan Kapasitas Desa Dalam Pengurangan Risiko Bencana Longsor Tebing Studi Kasus Sungai Winongo Yogyakarta” 2 (2024): 131–38.

wilayah subjek penelitian melibatkan kondisi wilayah, monopoli perdagangan, dan permanisme.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspa Dewi Amanda et al terletak pada metode yang digunakan merupakan kualitatif, selanjutnya persamaannya terletak pada tema bagaimana sumbangsih pentingnya perlindungan sosial terhadap masyarakat yang rentan. Adapun perbedaannya adalah metode lanjutan yang digunakan, peneliti menggunakan eksploratif sedangkan Puspa dkk menggunakan deskriptif. Perbedaan selanjutnya terketak pada faktor dan bentuk kerentanannya, Puspa dkk menyuguhkan data kerentanan pada kondisi niaga-sosial, sedangkan penelitan ini kerentanan sosial pada wilayah kumuh dan rentan terjadi bencana.

Kajian pustaka yang disertakan penulis tersebut, sebagian akan menjadi bahan pendukung, komparasi argumentasi, elaborasi, dan triangulasi penelitian. Dengan skema tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu menyajikan penemuan baru dalam lingkup isu kebencanaan, karena pada dasarnya penelitian ini merupakan model eksplorasi.

²⁹ Puspa Dewi Amanda et al., “Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Indonesia,” *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i1.1131>.

E. Kerangka Teori

1. Deskripsi Teori

a. Teori Perlindungan Sosial Formal

Perlindungan sosial merupakan sebuah konsep multidimensional yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai kerentanan dan guncangan sepanjang siklus kehidupan masyarakat. Kementerian Sosial Republik Indonesia mendefinisikan perlindungan sosial sebagai upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat agar mampu mengatasi berbagai kerentanan, terutama pada masa krisis, dengan tujuan utama menjaga produktivitas masyarakat miskin dan rentan. Definisi ini menekankan peran pemerintah dalam memberikan bantuan melalui program-program seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan inisiatif pemerintah lainnya.³⁰

Bank Dunia (World Bank) memberikan definisi yang lebih luas, memandang perlindungan sosial sebagai serangkaian tindakan publik yang dirancang untuk melindungi anggota masyarakat dari tekanan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan akibat berbagai kontingensi seperti sakit, persalinan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia lanjut, dan kematian. Selain itu, Bank Dunia juga memasukkan dalam definisi ini tindakan-tindakan yang mengatasi kemiskinan pendapatan, guncangan ekonomi, serta kerentanan sosial secara keseluruhan.³¹

³⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” Pub. L. No. Nomor 12, 2 255 (2009).

³¹ World Bank, *Social Protection Strategy: From Safety Net to Springboard, The Summer of Her Baldness* (Washington, D.C., 2001), <https://doi.org/10.7560/702561-009>.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai penyediaan manfaat kepada individu berdasarkan risiko yang dihadapi sepanjang siklus kehidupan mereka, serta bagi mereka yang menderita kemiskinan umum dan eksklusi sosial. ILO menekankan bahwa perlindungan sosial adalah hak asasi manusia universal dan merupakan kebutuhan ekonomi serta sosial untuk pembangunan dan kemajuan. Definisi ini menempatkan perlindungan sosial sebagai pilar penting dalam mewujudkan keadilan dan pembangunan berkelanjutan.³²

Secara yuridis di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Definisi ini sejalan dengan pemahaman Kementerian Sosial yang menggarisbawahi tanggungjawab negara dalam melindungi warganya dari berbagai risiko sosial dan ekonomi.³³

Perlindungan sosial merujuk pada serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan mempromosikan pasar tenaga kerja yang efisien, mengurangi risiko individu dan rumah tangga, serta meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola risiko ekonomi dan sosial, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan,

³² International Labour Organization, "World Social Protection Report 2017–19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals," Geneva: International Labour Office, 2017, <https://www.ilo.org/publications/world-social-protection-report-2017-19-universal-social-protection-achieve>.

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

ketidakmampuan, dan usia tua.³⁴ Menurut Devereux dan Sabates-Wheeler (2004), perlindungan sosial dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: bantuan sosial (*social assistance*), asuransi sosial (*social insurance*), dan program pasar tenaga kerja (*labour market programmes*).³⁵

Perlindungan sosial menurut definisi konseptual TNP2K 2020 adalah seluruh kebijakan dan program yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani risiko seerta guncangan yang dihadapi oleh semua warga negara sepanjang siklus hidupnya guna melindungi kelompok/komunitas tersebut dari kemiskinan dan kerentanaqn sosial.³⁶ Senada dengan Deverux dan Wheeler (2004) perindungan sosial di Indonesia terdiri dari tiga komponen penting juga dalam kerangka operasional, yaitu: 1) bantuan sosial (skema non-kontribusi) yang didanai oleh pemerintah, berupa transfer uang dalam tunai dan non-tunai serta natura bersasaran yang pada umumnya adalah kelompok miskin dan rentan (Program Keluarga harapan, Program Indonesia Pintar, BNPT bansos Rastra, ASPDB, ASLUT, serta BLSM BLT); 2) jaminan sosial (skema kontribusi) yang dindanai oleh peserta yang terdiri dari jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk pemberian subsidi untuk jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi kelompok miskin dan

³⁴ Armando Barrientos, "Social Protection and Poverty," *International Journal of Social Welfare* 20 (July 1, 2011): 240–49, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2011.00783.x>.

³⁵ Rachel Sabates-Wheeler and Stephen Devereux, "Social Protection for Transformation," *IDS Bulletin*, vol. 38, February 2, 2009, <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2007.tb00368.x>.

³⁶ Marihot Nasution et al., "Menilik Cakupan Program Perlindungan Sosial PEN Profil Sarana Dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Indonesia : ' Puskesmas & Rumah Sakit ' Tantangan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan" 01 (2021).

rentan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun PNS oleh PT Taspen, Jaminan Pensiun Militer, Kepolisian, dan Kemenhan oleh PT Asabri); 3) program terkait pekerjaan/mata pencaharian yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta dengan tujuan peningkatan akses terhadap pekerjaan/mata pencaharian yang lebih stabil dan layak, misalnya pelatihan dan pembukaan akses terhadap informasi pekerjaan.³⁷

b. Perlindungan Sosial Informal

Perlindungan sosial informal mengandalkan jaringan berbasis komunitas dari praktik tradisional untuk berbagai dukungan dan risiko di luar program pemerintah formal. Bentuk perlindungan ini sering kali berakar kuat dalam budaya lokal dan norma sosial, seperti tradisi gotong royong yang merupakan bentuk kerja sama dan saling membantu. Karakteristik utama dari perlindungan sosial informal adalah fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan respons yang cepat terhadap kebutuhan krisis lokal. Meskipun demikian, perlindungan ini mungkin tidak memiliki struktur formal, kekuatan hukum, dan sumber daya yang konsisten seperti program yang dipimpin oleh pemerintah. Cakupan dan manfaatnya juga dapat sangat bervariasi tergantung pada kekuatan dan sifat jaringan sosial atau komunitas.

Menurut Stephen Devereux dan Rachel Sebatés-Wheeler, perlindungan sosial informal berpusat pada sistem dukungan non-formal yang ada di luar mekanisme pengelolaan negara atau berbasis pasar. Perlindungan sosial informal mengacu pada sistem “tradisional” atau “*indigenous*” yang didasarkan

³⁷ *ibid*

pada keluarga besar, kekerabatan, dan dukungan komunitas, serta bentuk-bentuk institusional yang lebih baru seperti koperasi, asosiasi pasar, jimpit atau arisan, serta perkumpulan berbasis agama yang muncul sebagai respon terhadap keterbatasan perlindungan sosial formal. Mekanisme informal seringkali lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin dan rentan dibandingkan dengan solusi berbasis formal dan pasar karena ketergantungan mereka pada jaringan sosial daripada keperluan administrasi dan transaksi keuangan. Hal ini menyoroti keunggulan utama sistem informal dalam menjangkau populasi rentan yang mungkin dari sistem formal dan pasar.³⁸ Berikut beberapa komponen dari perlindungan sosial sendiri.

1) Komponen-komponen perlindungan sosial

Adapun beberapa komponen perlindungan sosial informal adalah sebagai berikut:

a) Jaringan kekerabatan dan keluarga besar

Jaringan ini memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, seperti finansial, material, maupun perawatan pada saat dibutuhkan. Ikatan keluarga dan kerabat berfungsi sebagai perlindungan informal yang penting, terutama dalam situasi di mana dukungan formal tidak ada atau tidak mencukupi.³⁹

³⁸ Sabates-Wheeler and Devereux, "Social Protection for Transformation."

³⁹ Sabates-Wheeler and Devereux.

b) Mekanisme berbasis komunitas

Inisiatif perlindungan sosial berbasis masyarakat ini terdiri dari berbagai kelompok dan organisasi informal yang memberikan dukungan kepada anggotanya, seperti arisan (rotasi tabungan dan kredit), inisiatif kesehatan komunitas, dan jaringan kerja informal. Pergerakan berbasis komunitas ini merupakan bentuk perlindungan sosial informal yang terorganisir, disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik anggotanya.

c) Mekanisme koperasi/simpan-pinjam

Prinsip memberi dan menerima merupakan mekanisme fundamental dalam perlindungan sosial informal. Timbal balik membangun modal sosial dan memastikan bahwa dukungan tersedia saat dibutuhkan, berdasarkan kontribusi masa lalu atau kontribusi masa depan yang diharapkan sebagai bentuk representasi aspek dinamis dan relasional dari dukungan informal.⁴⁰ Adapun mekanismenya

seperti kelompok informal yang memiliki anggota secara teratur yang menyumbangkan sejumlah uang dan dapat mengakses pinjaman atau sejumlah uang sekaligus. Kelompok ini memfasilitasi akses ke sumber daya keuangan dan berbagai kebutuhan, bertindak sebagai lembaga keuangan informal.

⁴⁰ *Ibid*

d) Kohesi dan norma sosial (altruisme)

Ikatan masyarakat yang kuat dan saling percaya satu sama lain merupakan indikator yang sangat penting untuk berfungsinya sistem informal secara efektif. Tingkat kohesi sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat kemungkinan mengarah pada jaringan perlindungan sosial informal yang lebih kuat dan handal. Kepercayaan sangat penting bagi individu untuk mengandalkan dukungan informal, terutama dalam ketiadaan kontrak formal.⁴¹

e) Bantuan mutual

Upaya kolektif oleh anggota masyarakat untuk saling mendukung dalam berbagai cara di luar bantuan keuangan juga merupakan mekanisme penting. Bantuan mutual dapat mencakup berbagai dukungan, termasuk berbagi tenaga kerja, penyebaran informasi, dan dukungan emosional. Hal ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana masyarakat membantu anggotanya.⁴²

2) Perbandingan Perlindungan Sosial Formal dan Informal

Dalam penerapan teori perlindungan sosial informal, maka perlu adanya melihat perbedaan antara perlindungan sosial formal dan informal dilihat dari beberapa aspek, seperti definisi, sumber pendanaan, mekanisme, cakupan, keamanan, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing.

⁴¹ Sabates-Wheeler and Devereux, "Social Protection for Transformation."

⁴² *Ibid*

Tabel 2. 1 Perbandingan Perlindungan Sosial Formal dan Informal

Aspek	Perlindungan Sosial Formal	Perlindungan Sosial Informal
Definisi	Program yang diinisiasi negara, ditetapkan secara hukum.	Berbasis komunitas, mengandalkan jaringan dan norma sosial.
Sumber Pendanaan	Anggaran pemerintah (pajak), kontribusi wajib.	Sumberdaya komunitas, kontribusi individu, timbal balik.
Mekanisme	Program terstruktur dengan kriteria kelayakan, birokrasi.	Fleksibel, berdasarkan kepercayaan dan bantuan timbal balik.
Cakupan	Potensi cakupan luas dan universal.	Terlokalisasi dan tergantung pada kapasitas komunitas.
Keamanan	Diwajibkan secara hukum, manfaat kemungkinan akan terjamin.	Bergantung pada kemauan dan kapasitas anggota sehingga rawan untuk jadi andalan.
Kelebihan	Skala, dukungan hukum, berbagai manfaat.	Fleksibilitas, aksesibilitas, memperkuat ikatan komunitas
Kekurangan	Birokratis, masalah penargetan, mungkin mengecualikan sektor informal.	Skala dan sumberdaya terbatas, potensi terhadap eksklusivitas, kurang terhadap dukungan hukum.

Sumber: Analisis Penulis dari Kerangka Teori

Perlindungan sosial formal memiliki potensi cakupan dan skala yang lebih luas, dengan tujuan mencapai jangkauan nasional. Manfaat yang ditawarkan lebih terstandarisasi dan diamanatkan pemerintah dan kontribusi wajib. Selain itu, perlindungan sosial formal menawarkan berbagai manfaat yang lebih luas, termasuk asuransi kesehatan komprehensif, dukungan pengangguran, dan pensiun. Pada tingkat nasional, sistem formal berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Namun, sistem formal juga tentunya memiliki beberapa kekurangan yang structural maupun kultural ketika menjamah instrumen masyarakat. Prosesnya biasanya sangat birokratis, kompleks, dan sulit diakses oleh

kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Masalah penargetan dan kesalahan eksklusi juga sering terjadi. Selain itu, sistem formal kurang fleksibel dan kurang mampu beradaptasi dengan konteks lokal dan kebutuhan individu yang lebih spesifik. Efektivitasnya dalam menjangkau sektor yang lebih kecil dan mereka yang tinggal di daerah terpencil juga terbatas. Keberlanjutan sistem formal juga dapat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan prioritas politik.

Di sisi lain, perlindungan sosial informal sangat fleksibel dan responsive terhadap kebutuhan segera dan terlokalisasi. Aksesnya lebih mudah, seringkali didasarkan pada kepercayaan dan hubungan sosial yang mapan. Sistem informal memperkuat solidaritas komunitas, kohesi sosial, dan jaringan dukungan timbal balik. Tentu akan sangat efektif dalam memberikan dukungan segera selama krisis di tingkat lokal dan krusial bagi individu yang dikecualikan dari mekanisme perlindungan sosial formal. Namun, perlindungan sosial informal memiliki skala dan sumberdaya yang terbatas, seringkali tidak mencukupi untuk mengatasi krisis skala besar atau berkepanjangan, kendalanya bisa tidak konsisten dan tergantung pada kapasitas serta kemauan anggota komunitas untuk membantu.

c. Teori Resiliensi

1) Definisi Teori Resiliensi

Secara etimologis resiliensi berasal dari pengadaptasian kata *resilience* yang memiliki arti daya lenting atau kemampuan untuk kembali

dalam bentuk sediakala.⁴³ Menurut *American Psychological Association* (APA), resiliensi merupakan proses adaptasi ketika menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, dan bahkan faktor-faktor lain yang menyebabkan individu stres.⁴⁴ Resiliensi didefinisikan oleh Wagnild dan Young (2013) sebagai sebuah bentuk kemampuan seseorang untuk pulih kembali dari kondisi yang tidak positif dan sebagai karakteristik kepribadian positif yang meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dan menghadapi emosi negatif.⁴⁵

2) Resiliensi Komunitas

Resiliensi menjadi diskursus yang tidak hanya terbatas pada konteks individu, namun juga komunitas dalam menghadapi krisis, seperti bencana alam, perubahan iklim, serta disrupti.⁴⁶ Resiliensi komunitas akan menjelaskan bagaimana kemampuan komunitas dalam mencapai daya lenturnya dan bangkit kembali secara kolektif ketika menghadapi krisis atau tekanan yang terjadi dalam ruang lingkup makro.⁴⁷ Komunitas memiliki

⁴³ Winda Aprilia, "Resiliensi Dan Dukungan Sosial Pada Orang Tua Tunggal (Studi Kasus Pada Ibu Tunggal Di Samarinda)," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 3 (2013): 157–63, <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v1i3.3326>.

⁴⁴ Steven Southwick et al., "Resilience Definitions, Theory, and Challenges: Interdisciplinary Perspectives," *European Journal of Psychotraumatology* 5 (October 1, 2014), <https://doi.org/10.3402/ejpt.v5.25338>.

⁴⁵ Gail M Wagnild and Heather M Young, "Development and Psychometric Evaluation of the Resilience Scale.," *Journal of Nursing Measurement* 1 2 (1993): 165–78, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:3634658>.

⁴⁶ Psikolog Dr. H. Fuad Nashori, M.Si., M.Ag. and Psikolog Iswan Saputro, S.Psi., M.Psi., *Psikologi Resiliensi, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: Kampus Terpadu UII, 2021).

⁴⁷ Dmitry Leykin et al., "Conjoint Community Resiliency Assessment Measure-28/10 Items (CCRAM28 and CCRAM10): A Self-Report Tool for Assessing Community Resilience.,"

potensi untuk berfungsi secara efektif dan penyesuaian dengan baik setelah mengalami tekanan atau bencana. Kehadiran resiliensi komunitas secara tidak langsung sangat dibutuhkan untuk menghubungkan antara potensi sumber daya pada kemampuan adaptasi setelah terjadinya krisis.⁴⁸

Menurut Ganor dan Lavy (2003) terdapat enam komponen penting dalam resiliensi komunitas. Pertama, *communication* yang meliputi arus informasi yang terbaru tentang situasi komunitas, ancaman yang akan dihadapi, layanan yang tersedia, dan sumber daya yang digunakan. Kedua, *cooperation* merupakan peningkatan rasa tanggungjawab pada level lokal dan diri pribadi dibandingkan harus menunggu bantuan dari pihak luar. Ketiga, *cohesion* adalah rasa empati yang meningkat kepada satu kelompok dengan ditandai saling membantu pada anggota kelompok yang lebih lemah, seperti para orang tua, imigran, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Keempat, *coping* merupakan kemampuan komunitas atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini dapat dilakukan dengan beragam mekanisme yang efektif dan efisien dalam mencegah traumatis serta membantu pada saat masa sulit. Kelima, *credibility* yang lebih condong pada tipe kepemimpinan yang ada dalam komunitas dengan mempertimbangkan nilai dan aspirasi dari kelompok.

American Journal of Community Psychology 52, no. 3–4 (December 2013): 313–23, <https://doi.org/10.1007/s10464-013-9596-0>.

⁴⁸ Fran H Norris et al., “Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness,” *American Journal of Community Psychology* 41, no. 1–2 (March 2008): 127–50, <https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6>.

Keenam, *credo* merupakan tujuan yang dimiliki komunitas untuk menghadirkan harapan yang lebih baik di masa depan.⁴⁹

d. Teori Manajemen Bencana

1) Definisi Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berasal dari beberapa sebab, yaitu faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan hingga dampak psikologis.

Dari definisi tersebut maka lahirlah pembagian definisi bencana menjadi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam sendiri merupakan bencana yang diakibatkan oleh alam seperti berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor. Sedangkan bencana nonalam sendiri adalah bencana yang berasal dari peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam seperti berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan kejadian bencana dapat dihitung sebagai peristiwa bencana yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Maka, jika terjadi bencana pada tanggal yang sama

⁴⁹ Michael Ganor and Yuli Ben-Lavy, "Community Resilience: Lessons Derived from Gilo Under Fire," *Journal of Jewish Communal Service* 79 (2003), <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:130876568>.

dan berdampak lebih dari satu wilayah, dihitung sebagai satu kejadian bencana⁵⁰

2) Definisi Manajemen Bencana

Manajemen penanggulangan bencana dapat dideskripsikan sebagai segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelumnya, saat dan setelah bencana.⁵¹ Menurut UU No. 24 Tahun 2007, manajemen bencana merupakan suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu dalam meningkatkan kualitas proses-proses yang berkaitan dengan observasi dan telaah bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana.⁵²

Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses dinamis yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik dengan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk

⁵⁰ <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana> diakses 20 Januari 2025

⁵¹ M. Arsyad, "Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir," *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi*, 2017, 77.

⁵² Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

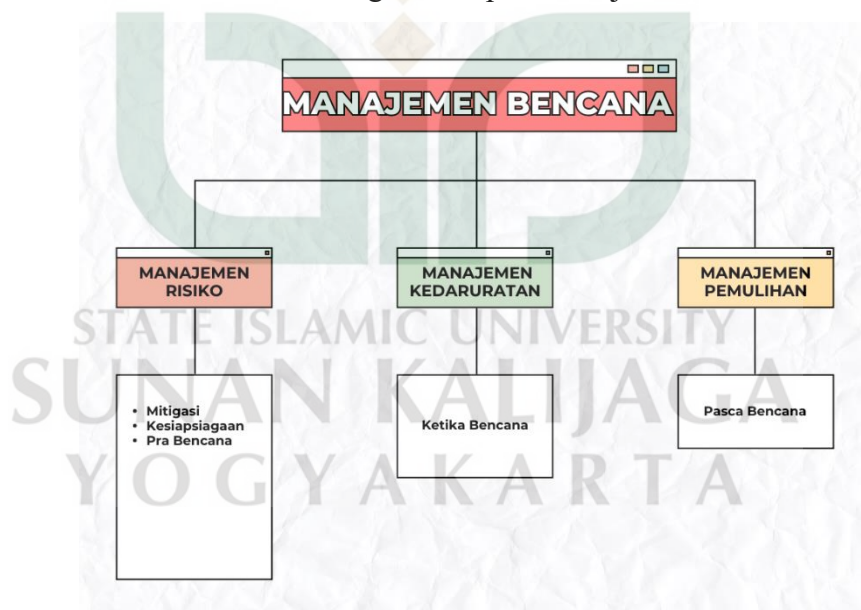
melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan akibat bencana.⁵³

3) Tahapan Manajemen Bencana

Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui tiga tahap:

- a) Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana.
- b) Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.
- c) Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana

Gambar 1. 1 Bagan Tahapan Manajemen Bencana



⁵³ Arsyad, "Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir."

Dalam keseluruhan tahapan manajemen bencana yang sudah disebutkan diatas, ada tiga manajemen yang akan dipakai, yaitu⁵⁴:

1) Manajemen Risiko Bencana

Merupakan pengaturan/manajemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk:

- a) Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan ini seharusnya masuk manajemen darurat, namun tempatnya di pra bencana. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga/komunitas yang berwenang.

⁵⁴ *ibid*

2) Manajemen Kedaruratan

Adalah pengkondisian upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana dengan fase tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasaranan dan sarana.

3) Manajemen Pemulihan

Adalah pengkondisian upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkenan bencana dengan mengaktivasi kembali kelembagaan, prasaranan, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fase sebagai berikut:

- a) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

- b) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasaranan, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

2. Relevansi Teori

Mengutip tulisan dari Stepleman, Wright, dan Bottonari (2008) dalam karyanya yang berjudul “*Socioeconomic Status: Risks and Resilience*” menjelaskan salah satu model yang mengkaji tentang kerentanan dari faktor status sosial dan ekonomi adalah *social selection* yang mengungkapkan bahwa faktor genetik dan lingkungan menjadi predisposisi terhadap gangguan psikologis yang diderita oleh individu dan kelompok. Hal ini kemudian berdampak pada individu tidak dapat memenuhi ekspektasi dalam norma sosial, tidak mendapatkan pekerjaan, atau tidak memiliki hubungan sosial yang efektif.⁵⁵

Maka penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh perkotaan menghadapi tantangan berlapis dalam menghadapi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir. Tantangan ini tidak hanya bersifat fisik dan lingkungan, tetapi juga menyentuh

⁵⁵ Lara M Stepleman, Dustin E Wright, and Kathryn A Bottonari, “Socioeconomic Status: Risks and Resilience BT - Determinants of Minority Mental Health and Wellness,” ed. Sana Loue and Martha Sajatovic (New York, NY: Springer New York, 2009), 1–30, https://doi.org/10.1007/978-0-387-75659-2_13.

dimensi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana strategi penguatan resiliensi dibentuk, penelitian ini merujuk pada sejumlah teori dan konsep yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu; gambaran kerentanan masyarakat kumuh, teori manajemen bencana, teori perlindungan sosial informal, dan pada tujuan resiliensi itu sendiri.

Konsep kerentanan masyarakat kumuh memberikan dasar untuk memahami posisi rentan masyarakat terhadap risiko bencana. Wisner et al. (2003) menjelaskan bahwa kerentanan adalah kondisi individu atau kelompok memiliki kapasitas rendah untuk mengantisipasi, merespon, dan pulih dari dampak bencana. Dalam konteks masyarakat kumuh perkotaan, kerentanan ini diperparah oleh kondisi lingkungan yang padat, infrastruktur yang buruk, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan ketidakstabilan ekonomi. Kelurahan Ngampilan misalnya, wilayah-wilayah tertentu masing menghadapi masalah drainase buruk, rumah kurang layak huni, dan dominasi pekerjaan informal yang tidak memiliki jaminan penghasilan tetap. Kondisi-kondisi seperti ini menjadikan masyarakat setempat sangat rentan terhadap banjir dan dampak ikutan seperti penyakitm kerugian ekonomi, hingga kehilangan tempat tinggal.⁵⁶

Dalam menghadapi risiko tersebut, konsep manajemen bencana menjadi relevan untuk membongkai bagaimana masyarakat dapat merespon bencana secara sistematis. Berdasarkan *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNDRR, 2015, manajemen bencana terdiri dari tiga tahap utama: mitigasi

⁵⁶ Ben Wisner et al., *At Risk: Natural Hazards, Peoples Vulnerability and Disasters*, At Risk: Natural Hazards Peoples Vulnerability and Disasters, 2003, <https://doi.org/10.4324/9780203714775>.

(sebelum bencana) respon (saat bencana), dan pemulihan (setelah bencana). Pada setiap tahapan tersebut, actor-aktor lokal maupun kelembagaan memiliki peran masing-masing dalam mengurangi dampak dan mempercepat proses adaptasi masyarakat.

Namun, dalam konteks masyarakat yang secara struktural kurang mendapatkan perlindungan formal, keberadaan perlindungan sosial informal menjadi penting. Perlindungan sosial informal merujuk pada bentuk-bentuk dukungan sosial yang bersifat non-institusional dan berbasis pada jaringan sosial seperti keluarga, tetangga, komunitas, organisasi keagamaan, dan kelompok sosial lainnya.⁵⁷ Dalam komunitas masyarakat kumuh, perlindungan sosial informal dapat berupa kegiatan gotong royong membersihkan saluran air, arisan untuk keperluan darurat, inisiatif komunitas membangun jalur evakuasi, atau pemanfaatan tempat ibadah sebagai tempat evakuasi darurat.

Ketika dua konsep antara manajemen bencana dan perlindungan sosial informal menjadi satu, maka ada beberapa poin penting yang menjadi acuan kedua konsep tersebut menjadi satu mekanisme kemudian berujung pada tahapan-tahapan penting. Menurut Ellis (2012), perlindungan sosial informal memiliki tiga peran dalam tahapan menghadapi bencana;

- a. Mekanisme pencegahan: mempersiapkan komunitas sebelum bencana terjadi.
- b. Mekanisme respon: membantu warga dalam masa krisis.

⁵⁷ Sabates-Wheeler and Devereux, "Social Protection for Transformation."

- c. Mekanisme pemulihan: memfasilitasi pemulihan sosial dan ekonomi pasca-bencana.

Perlindungan sosial informal memainkan peran penting yang signifikan dalam seluruh tahapan manajemen bencana. Misalkan sebelum bencana, warga sering kali berinisiatif memperbaiki infrastruktur sederhana secara kolektif atau membangun kesadaran bersama melalui musyawarah RT/RW. Ketika bencana terjadi, relasi sosial yang kuat memungkinkan terbentuknya respon spontan berupa bantuan makanan, logistik, atau tempat mengungsi. Pasca-bencana, jaringan sosial ini terus berperan dalam membantu proses pemulihan baik secara material maupun psikososial.

Maka perlindungan sosial informal ini akan mempengaruhi resiliensi komunitas di Kelurahan Ngampilan dalam menghadapi bencana. Teori resiliensi komunitas yang akan digunakan merupakan teori dari Ganor dan Lavy (2003) yang mengemukakan enam komponen penting dalam resiliensi komunitas. Pertama, *communication* yang meliputi arus informasi yang terbaru tentang situasi komunitas, ancaman yang akan dihadapi, layanan yang tersedia, dan sumber daya yang digunakan. Kedua, *cooperation* merupakan peningkatan rasa tanggungjawab pada level lokal dan diri pribadi dibandingkan harus menunggu bantuan dari pihak luar. Ketiga, *cohesion* adalah rasa empati yang meningkat kepada satu kelompok dengan ditandai saling membantu pada anggota kelompok yang lebih lemah, seperti para orang tua, imigran, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Keempat, *coping* merupakan kemampuan komunitas atau kelompok dalam menambil sebuah keputusan. Keputusan ini dapat dilakukan dengan beragam mekanisme yang efektif

dan efisien dalam mencegah traumatis serta membantu pada saat masa sulit. Kelima, *credibility* yang lebih condong pada tipe kepemimpinan yang ada dalam komunitas dengan mempertimbangkan nilai dan aspirasi dari kelompok. Keenam, *credo* merupakan tujuan yang dimiliki komunitas untuk menghadirkan harapan yang lebih baik di masa depan.⁵⁸

Dari keseluruhan rangkaian konsep tersebut, penelitian ini memandang bahwa penguatan resiliensi masyarakat bukan semata-mata ditentukan oleh intervensi formal dari negara, tetapi juga signifikan dipengaruhi oleh dinamika sosial internal masyarakat. Resiliensi dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana secara mandiri dan kolektif.⁵⁹ Oleh karena itu, interaksi antara kerentanan structural masyarakat kumuh, efektivitas manajemen bencana, dan kekuatan perlindungan sosial informal merupakan titik krusial dalam upaya penguatan kapasitas ketahanan masyarakat.

⁵⁸ Ganor and Ben-Lavy, "Community Resilience: Lessons Derived from Gilo Under Fire."

⁵⁹ Carl Folke et al., "Resilience Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability," *Ecology and Society* 15, no. 4 (2010), <https://doi.org/10.5751/ES-03610-150420>.

Secara skematik, hubungan antar konsep tersebut dapat digambarkan dalam model teoritik berikut:

Tabel 1. 1 Skema Keterkaitan Antar Teori/Konsep Penelitian

Kerentanan Masyarakat Kumuh	Tahapan Manajemen Bencana	Peran Perlindungan Sosial Informal	Dampak Pada Resiliensi Komunitas (Masyarakat)
Kepadatan penduduk tinggi → Sulit evakuasi & penyebaran penyakit lebih cepat.	1. Sebelum Bencana (Mitigasi & Kesiapsiagaan)	- Edukasi berbasis komunitas. - Gotong royong memperbaiki lingkungan. - Tabungan/arisan darurat.	- Meningkatkan kesiapan warga. - Mengurangi risiko kesehatan.
Kualitas infrastruktur buruk → Drainase buruk, rumah rentan rusak		- Inisiatif warga memperbaiki saluran air. - Dana sosial untuk perbaikan rumah.	- Mengurangi risiko banjir.
Mayoritas pekerjaan sektor informal → Penghasilan tidak tetap, sulit pulih pasca-bencana.	2. Saat Bencana (Respons & Adaptasi)	- Evakuasi berbasis komunitas. - Masjid/mushola sebagai tempat pengungsian. - Bantuan makanan & logistik dari warga.	- Warga lebih cepat mendapatkan bantuan. - Mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
Minim akses layanan kesehatan → Sulit mendapat bantuan medis pasca-bencana.	3. Setelah Bencana (Pemulihan & Rekonstruksi)	- Gotong royong membersihkan lingkungan. - Bantuan psikososial dari komunitas. - Pinjaman sosial antarwarga untuk pemulihan ekonomi.	- Pemulihan lebih cepat. - Masyarakat bisa kembali bekerja lebih cepat.

Tabel di atas merupakan gambaran hubungan antar teori yang akan saling berkaitan satu sama lain. Di setiap bagian teori terdapat alasan dan dampak kaitan satu sama lainnya.

Model ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial informal memiliki kontribusi penting dalam menanggulangi kerentanan masyarakat kumuh melalui keterlibatannya dalam setiap tahap manajemen bencana. Dengan demikian, pendekatan berbasis komunitas yang mengandalkan kekuatan relasi sosial lokal menjadi strategi kunci dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, yang terletak di Jl. Purwodiningratan No.922, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian dan Studi

Studi ini merupakan studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk investigasi secara mendalam tentang suatu fenomena, individu dan kelompok, atau institusi dalam konteks kehidupan nyata. Mengutip dari Creswell, penelitian studi kasus bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang masalah yang kompleks melalui pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen.⁶⁰

⁶⁰ Jhon David Creswel and Creswel. Jhon W, *Research Design; Qualitative, Quantitative, Dan Mixed Methods Approaches*, ed. Helen Salmon, *Writing Center Talk over Time: A Mixed-*

Alasan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus adalah karena metode ini bersifat fleksibel dan dinamis, sehingga memungkinkan peneliti untuk beradaptasi dengan kebutuhan di lapangan, serta memfokuskan pada pemahaman mendalam dari subjek yang diteliti secara unik dan tidak umum.⁶¹

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan lanjutan teknik *snowball* karena pengambilan sampel informan berdasarkan karakteristik dan kriteria penelitian. Teknik *snowball* dilakukan karena akan berdampak pada hasil data yang ditemukan yang rawan mendapatkan data jenuh dan *missing understanding* antar informan.

Adapun daftar informan dan jenis informasi yang akan diambil adalah sebagai berikut:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Method Study, Fifth Edit (SAGE Publications, Inc., 2018),
<https://doi.org/10.4324/9780429469237>.

⁶¹ *Ibid*

Tabel 1. 2 Daftar Informan dan Jenis Informasi yang Akan Diambil

No	Informan	Informasi Yang Ingin Didapatkan	Data Informan
1.	BPBD Kota Yogyakarta; Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan	Data bencana hidrometeorologi Kelurahan Ngampilan serta penyaluran program manajemen kebencanaan.	Pak Ibnu Hajar, Fasilitator Kebencanaan Wilayah Ngampilan
2.	Lurah dan Perangkat Kelurahan Ngampilan	Profil dan sejarah Kelurahan Ngampilan, serta kondisi dan situasi terkini kelurahan terkait bencana hidrometeorologi.	A. Pak Dal Sugiarto, Kasi Pemerintahan, Ketertiban, dan Ketentraman. B. Pak Sutaryo, Kasi Perekonomian dan Pembangunan
3.	RW dan RT setempat	Dampak bencana serta keberadaan dan manfaat program-program perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak.	1. Ibnu Hajar, Ketua RW 2 Ngampilan. 2. Atika, Sekretaris RW 1
4.	Masyarakat	Komunitas masyarakat yang peduli dengan kesiapsiagaan dan dampak dari bencana. Manifestasi keberadaan komunitas informal.	Sarijo

Adapun objek penelitian ini adalah perlindungan sosial sebagai strategi penguatan resiliensi masyarakat di kawasan kumuh Kelurahan Ngampilan, Kota Yogyakarta dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dengan pendekatan *representative judgment* dengan alasan sumber informasi hanya terdapat dari beberapa informan saja dari beberapa lembaga sosial dan bencana dan bentuk penelitian ini adalah studi kasus, serta representasi dari masyarakat kumuh perkotaan. Informan kunci ada BPBD Yogyakarta di Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan, Lurah dan Staff Kelurahan Ngampilan, serta RW/RT setempat sebagai Tokoh Masyarakat, serta masyarakat Kampung Ngampilan.

Selanjutnya adalah menggunakan teknik observasi semi partisipan, di mana peneliti tidak sepenuhnya menjadi bagian dari kelompok atau hanya menjadi pengamat pasif, memiliki peran yang berada di antara keduanya. Peneliti berpartisipasi dalam aktivitas kelompok yang diamati tetapi hanya sebagian, dengan sebagian anggota kelompok tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati. Tujuannya adalah untuk memahami praktik, nilai, dan interaksi sosial yang kompleks dalam suatu kelompok secara mendalam.

Peneliti sudah melakukan pengumpulan data yang lengkap, di mana pada tahap awal peneliti meminta izin kepada Lurah dan stakeholder di lingkungan Kelurahan Ngampilan. Setelah mendapatkan izin, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terkait. Pertama dengan Staff Kelurahan, yaitu; Bapak

Sutaryo, Amd., sebagai Kasi Perekonomian dan Pembangunan dan Bapak Dal Sugiarto, S.H., sebagai Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban menggali data tentang kondisi dan situasi terkini terkait wilayah kumuh perkotaan, bencana, dan sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Ngampilan. Kedua, dengan Bapak Didit selaku Ketua Kampung Tangguh Bencana di Wilayah Ngampilan terkait gerakan non struktural dan kekuatan solidaritas masyarakat dalam menghadapi setiap fase bencana, serta Riwayat kebencanaan yang sering terjadi. Ketiga, wawancara dengan Ibu Atika, selaku Sekretaris RW 1 tentang kondisi masyarakat di Wilayah Ngampilan dalam tanggap bencana, kondisi keguyuban masyarakat, serta peran-peran perlindungan sosial informal yang dapat membangun resiliensi pada komunitas masyarakat. Keempat, wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar dari BPBDB Kota Yogyakarta selaku fasilitator tanggap bencana di wilayah Kecamatan Ngampilan dan Notoprajan guna menggali data tentang kebencanaan di Ngampilan dan pergerakan kultural dari masyarakat sebagai kesadaran menghadapi bencana. Kelima, wawancara dengan Bapak Sarijo, selaku salah satu warga yang aktif dalam rutinitas masyarakat yang tanggap terhadap bencana untuk ketahanan masyarakat itu sendiri.

5. Analisa Data

Pada penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dan memformulasikan data yang diperoleh dari lapangan, lalu mereduksi data dengan mengklasifikasikan sesuai dengan tema pada judul penelitian kesesuaian perlindungan sosial informal sebagai fondasi resiliensi bencana pada komunitas kumuh perkotaan di Kelurahan Ngampilan. Tahapan analisis data pada penelitian

ini dilakukan selama 3 sampai 4 minggu setelah mendapatkan data lengkap, kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian. Lalu peneliti menarik kesimpulan data yang sudah didapatkan dan disajikan sebelumnya.

Setelah data didapatkan, peneliti melakukan koding data menggunakan beberapa *software* guna mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, di samping itu juga peneliti menggunakan metode manual untuk meminimalisir adanya error pada *software*. Setelah dianalisis, penulis melakukan triangulasi data lewat via *WhatsApp* dengan beberapa informan dan membandingkan dengan hasil observasi yang dilakukan. Setelah itu, peneliti menuangkan data-data yang sudah dipilih yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam tulisan di Bab 3 bagian hasil dan pembahasan.

6. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini, validitas data sangat penting untuk untuk membuktikan sebuah data yang sudah diperoleh di lapangan dan membangun kepercayaan kepada pembaca. Teknik validitas data yang digunakan ialah teknik triangulasi data menurut Norman K Denzin mendefinisikan teknik triangulasi data sebagai campuran dari berbagai macam metode yang digunakan untuk mengkaji peristiwa yang berkaitan pada perbedaan sudut pandang dan perspektif. Menurutnya, teknik triangulasi paling umum yaitu:⁶²

⁶² Denzin, Norman K.; Lincoln, Yvonna S. *Handbook Of Qualitative Research / Norman K. Denzin* .2009

a. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan proses membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana penelitian kualitatif pada biasanya yang menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Penulis akan menggunakan beberapa dari metode tersebut untuk menyaring informasi yang sama supaya memperoleh kebenaran informasi yang handal dan memiliki gambaran yang utuh terhadap informasi tertentu.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode triangulasi untuk menguji data dari beberapa informan yang akan memberikan informasinya terhadap penulis dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh selama proses analisis data sehingga dapat meningkatkan kredibilitas data yang didapatkan. Metode ini juga dapat memperkaya perspektif penulis dalam satu informasi tertentu.

Penelitian ini lebih menekankan pada teknik triangulasi metode dan sumber. Dengan menggali kebenaran atau fakta mengenai informasi dari berbagai metode dan data yang didapat seperti dokumen tertulis, arsip, catatan resmi dan catatan pribadi. Hal tersebut akan melahirkan bukti dan data yang berbeda dari teknik sebelumnya dan memberikan gambaran baru untuk kasus yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi dalam empat bab yang akan dipaparkan penjelasan mengenai bab-bab masing sehingga dapat diketahui arti

penting masing-masing bagian bab dan keterkaitannya antara pembahasan satu dengan pembahasan lainnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab satu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan terkait lokasi penelitian guna menggambarkan secara umum mulai dari profil Kelurahan Ngampilan yang terdiri dari letak geografis dan sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, demografi dan topografi, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Ngampilan. Selanjutnya terdapat karakteristik kawasan kumuh dan risiko serta riwayat kebencanaan di Kelurahan Ngampilan. Terakhir penulis akan jelaskan salah satu pergerakan semi formal dari masyarakat sebagai salah satu representasi perlindungan sosial masyarakat Kelurahan Ngampilan, yaitu Kampung Tangguh Bencana (KTB) mulai dari sejarah, fungsi, pola koordinasi hingga program-programnya.

BAB III: Hasil Dan Pembahasan Mengenai Strategi Perlindungan Sosial Sebagai Penguatan Resiliensi. Pada bab tiga membahas mengenai hasil penelitian terkait dengan strategi perlindungan sosial berupa program-program sebagai bentuk penguatan resiliensi masyarakat setempat dalam tahapan manajemen bencana.

BAB IV: Kesimpulan Dan Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai jawaban yang dinyatakan pada rumusan masalah serta saran dan rekomendasi yang dianggap perlu dalam perbaikan, kemajuan dan pengembangan program perlindungan sosial sebagai penguatan resiliensi masyarakat rentang di

wilayah kumuh perkotaan Kota Yogyakarta, khususnya di Kelurahan Ngampilan.

Selain itu peneliti juga mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah mengenai dampak perlindungan sosial informal dalam memperkuat resiliensi komunitas kumuh di Kelurahan Ngampilan, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme perlindungan sosial informal merupakan fondasi utama yang memungkinkan komunitas untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari bencana. Peran krusial ini termanifestasi secara nyata dalam setiap tahapan manajemen bencana.

Pada Tahap Prabencana, perlindungan sosial informal berfungsi sebagai mekanisme mitigasi dan kesiapsiagaan. Praktik seperti gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan penyebaran informasi kebencanaan melalui jaringan sosial informal (arisan, pengajian) terbukti efektif dalam membangun kesadaran dan kapasitas kolektif sebelum bencana terjadi.

Pada Tahap Tanggap Darurat, mekanisme informal menjadi garda terdepan respons bencana. Solidaritas dan resiprositas yang kuat memungkinkan mobilisasi sumber daya lokal secara cepat, seperti penyediaan hunian sementara, bantuan logistik, dan evakuasi, jauh sebelum intervensi formal tiba. Pola koordinasi *bottom-up* yang fleksibel dan berbasis kepercayaan menjadi kunci efektivitas respons awal.

Pada Tahap Pascabencana, gotong royong kembali menjadi motor penggerak pemulihan awal, baik secara fisik (membersihkan puing) maupun psikososial. Lembaga semi-formal seperti KTB berperan sebagai "perantara sosial" yang menjembatani kebutuhan komunitas dengan sumber daya dari lembaga formal.

Dampak langsung dari bekerjanya sistem perlindungan sosial informal ini adalah terbentuknya resiliensi komunitas yang solid, yang dapat diuraikan melalui enam komponen utama. Pertama, praktik ini memperkuat komunikasi melalui jalur informal yang cepat seperti grup WhatsApp dan "getok tular", memastikan informasi peringatan dini dan kebutuhan bantuan tersebar merata. Kedua, semangat gotong royong mendorong kerja sama (*cooperation*) dan inisiatif lokal, menjadikan warga sebagai penanggap pertama yang proaktif tanpa menunggu bantuan eksternal.

Ketiga, solidaritas dan rasa senasib membangun kohesi sosial (*cohesion*) yang kuat, terbukti dari tindakan spontan menyediakan hunian sementara dan bantuan logistik. Keempat, komunitas menunjukkan kemampuan mengatasi masalah (*coping*) yang adaptif dengan mengembangkan alur koordinasi yang fleksibel dan efektif. Semua ini ditopang oleh kredibilitas pemimpin informal dan keyakinan bersama (*credo*) akan nilai resiprositas.

Meskipun sangat vital, penelitian ini juga menemukan bahwa resiliensi yang terbangun bersifat rentan (*precarious resilience*). Ketangguhan ini rapuh karena sangat bergantung pada sumber daya internal yang terbatas, kerja sukarela, dan berisiko menutupi lemahnya dukungan formal yang komprehensif dari negara.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis untuk para pembaca maupun instansi yang terkait.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perlindungan sosial formal dan informal melalui kebijakan yang responsif terhadap konteks kawasan kumuh rentan bencana. Penyediaan fasilitas pendukung, pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan pendanaan yang cukup untuk KTB perlu dipertimbangkan.

2. Bagi Komunitas Masyarakat

Diharapkan dapat terus merawat praktik gotong royong, solidaritas, dan memperkuat kapasitas internal melalui forum warga, pelatihan mitigasi, serta menumbuhkan inovasi perlindungan sosial berbasis komunitas masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian serupa dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau fokus pada model kolaborasi perlindungan sosial formal-informal secara lebih mendalam, sehingga dapat menjadi masukan praktik bagi penguatan kebijakan manajemen kebencanaan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Puspa Dewi, Fatmawati Fatmawati, Yasinta Najwa, Safiq Al-Kalam, and Sarah Nuraini Wahyudi. "Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Indonesia." *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 1 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i1.1131>.
- Angrelia, Chrisdawati, Rendy Prihastha, Anjas Chusni Mubarak, and Wahyu Kartiko Utami. "Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir Tahun 2020." *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 2020. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:225755041>.
- Aprilia, Winda. "Resiliensi Dan Dukungan Sosial Pada Orang Tua Tunggal (Studi Kasus Pada Ibu Tunggal Di Samarinda)." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 3 (2013): 157–63. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v1i3.3326>.
- Arsyad, M. "Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir." *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi*, 2017, 77.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2023*. BNPB, 2023. <https://www.bnpb.go.id/buku/buku-data-bencana-indonesia-tahun-2023>.
- . *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024*, 2024. [https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buku BNPB/BUKU IRBI 2024_BNPB_lowres.pdf](https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buku%20BNPB/BUKU%20IRBI%202024_BNPB_lowres.pdf).
- Barrientos, Armando. "Social Protection and Poverty." *International Journal of Social Welfare* 20 (July 1, 2011): 240–49. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2011.00783.x>.
- BPBD DIY. "DESTANA Dan SPAB," 2019. <https://bpbd.jogjaprovo.go.id/spab-dan-destana>.
- BPBD Kota Yogyakarta. "Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022 - 2026." Yogyakarta, 2022. <https://bpbd.jogjakota.go.id/assets/instansi/bpbd/files/dokmen-kajian-risiko-bencana-kota-yogyakarta-2022-2026-13325.pdf>.
- Chugh, Gaurika. "Migrant Urban Settlements and Disaster Management." In *International Handbook of Disaster Research*, edited by Amita Singh, 1–10. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8800-3_205-1.

- Creswel, Jhon David, and Creswel. Jhon W. *Research Design; Qualitative, Quantitative, Dan Mixed Methods Approaches*. Edited by Helen Salmon. *Writing Center Talk over Time: A Mixed-Method Study*. Fifth Edit. SAGE Publications, Inc., 2018. <https://doi.org/10.4324/9780429469237>.
- Dr. H. Fuad Nashori, M.Si., M.Ag., Psikolog, and Psikolog Iswan Saputro, S.Psi., M.Psi. *Psikologi Resiliensi. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Kampus Terpadu UII, 2021.
- Folke, Carl, Stephen R. Carpenter, Brian Walker, Marten Scheffer, Terry Chapin, and Johan Rockström. “Resilience Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability.” *Ecology and Society* 15, no. 4 (2010). <https://doi.org/10.5751/ES-03610-150420>.
- Ganor, Michael, and Yuli Ben-Lavy. “Community Resilience: Lessons Derived from Gilo Under Fire.” *Journal of Jewish Communal Service* 79 (2003). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:130876568>.
- Handoko, Waluyo. “Menjaga Sustainability Pengembangan Masyarakat Pesisir Kebumen : Antara Corak Top-Down, Partisipatif Dan Inisiasi Kelembagaan Lokal.” *Sosiohumaniora* 19, no. 3 (2017): 244–52. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.10291>.
- Harsanto, Puji, Restu Faizah, Diva Darma Wijaya, Nazrey Rahario Nugroho, and Rika Muzlifa. “Peningkatan Kapasitas Desa Dalam Pengurangan Risiko Bencana Longsor Tebing Studi Kasus Sungai Winongo Yogyakarta” 2 (2024): 131–38.
- Humas BAZNAZ RI. “BAZNAS Ajak Masyarakat Gotong Royong Bantu Korban Terdampak Bencana Di Indonesia,” 2024. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Gotong_Royong_Bantu_Korban_Terdampak_Bencana_di_Indonesia/1999.
- International Labour Organization. “The World Bank Group and ILO Universal Social Protection Initiative.” International Labour Organization, 2015. <https://www.ilo.org/resource/world-bank-group-and-ilo-universal-social-protection-initiative>.
- . “World Social Protection Report 2017–19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals.” Geneva: International Labour Office, 2017. <https://www.ilo.org/publications/world-social-protection-report-2017-19-universal-social-protection-achieve>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pub. L. No. 14/PRT/M/2018, JDIHN dan BPK 1

(2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/104649/permen-pupr-no-14prtm2018-tahun-2018>.

Leykin, Dmitry, Mooli Lahad, Odeya Cohen, Avishay Goldberg, and Limor Aharonson-Daniel. "Conjoint Community Resiliency Assessment Measure-28/10 Items (CCRAM28 and CCRAM10): A Self-Report Tool for Assessing Community Resilience." *American Journal of Community Psychology* 52, no. 3–4 (December 2013): 313–23. <https://doi.org/10.1007/s10464-013-9596-0>.

Mah, Jasmine Cassy, Jodie Lynn Penwarden, Henrique Pott, Olga Theou, and Melissa Kathryn Andrew. "Social Vulnerability Indices: A Scoping Review." *BMC Public Health* 23, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16097-6>.

Masyhuri, Aziz, Hartuti Purnaweni, Augustin Herawati, and Budi Priyadi. "Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4 (October 24, 2021): 854–62. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.759>.

Mulayana, Nana, Yasinta Fitriyani, Melisa Febriani, Ita Prihantika, Sumanjoyo Hutagalung, and Rahayu Sulistiowati. "Legal Analysis of Social Protection in Disaster Management in the Province of Lampung" 2023 (2023): 624–34. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13027>.

Nasution, Marihot, Martha Carolina, Savitri Wulandari, and Mutiara Shinta. "Menilik Cakupan Program Perlindungan Sosial PEN Profil Sarana Dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Indonesia : ' Puskesmas & Rumah Sakit ' Tantangan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan" 01 (2021).

Norris, Fran H, Susan P Stevens, Betty Pfefferbaum, Karen F Wyche, and Rose L Pfefferbaum. "Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness." *American Journal of Community Psychology* 41, no. 1–2 (March 2008): 127–50. <https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6>.

Novianty, Anita. "Penyesuaian Dusun Jangka Panjang Ditinjau Dari Resiliensi Komunitas Pasca Gempa." *Jurnal Psikologi* 38, no. 1 (2011): 30–39.

Pranandari, Rizka, Kahar Shuzuran, and Muhammad Wibowo. "Pengaruh Indeks Risiko Bencana, PDRB Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Wilayah Berdominasi Perkotaan Di Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2020." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5 (June 30, 2022): 14–34. <https://doi.org/10.52266/jesa.v5i1.758>.

Pranata, Satriya, Dwi Saftantri, Rini Putri, Nida Un, Taqwiyani Ashshofiyah,

- Risnatun Hasanah, Novita Putri, and Nurkholis. "Pengaruh Pelatihan Dan Simulasi Manajemen Bencana Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Kesiapsiagaan Bencana Di Sekolah Dasar Negeri 1 Banyuroto Magelang." *Journal Nursing Research Publication Media (NURSEPEDIA)* 2 (November 29, 2023): 148–55. <https://doi.org/10.55887/nrpm.v2i3.45>.
- Rahmaningtyas, Nisakhaira dan Sih Setyono Jawoto. "Tingkat Kerentanan Sosial Wilayah Kabupaten Wonogiri." *Teknik PWK* 2, no. 4 (2013): 895–904. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>.
- Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016, 66 § (2016).
- Rendi, Wahyu. "Polsek Ngampilan Bersama Kampung Tanggap Bencana Evakuasi Pohon Tumbang Di Jalan K.H. Ahmad Dahlan." *Tribrata News*, 2025. Polsek Ngampilan Bersama Kampung Tanggap Bencana Evakuasi Pohon Tumbang di Jalan K.H. Ahmad Dahlan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. Nomor 12, 2 255 (2009).
- Sabates-Wheeler, Rachel, and Stephen Devereux. "Social Protection for Transformation." *IDS Bulletin*. Vol. 38, February 2, 2009. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2007.tb00368.x>.
- Sadali, Mohammad Isnaini, Fitri Noviyanti, and Rifan Andika. "Asosiasi Dan Distribusi Spasial Permukiman Kumuh Di Kota Yogyakarta." *Media Komunikasi Geografi* 20, no. 2 (2019): 173. <https://doi.org/10.23887/mkg.v20i2.21102>.
- Sosial, Kementerian. Permensos Nomor 10 Tahun 2020, 2017 § (2020). <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>.
- Southwick, Steven, George Bonanno, Ann Masten, Catherine Panter-Brick, and Rachel Yehuda. "Resilience Definitions, Theory, and Challenges: Interdisciplinary Perspectives." *European Journal of Psychotraumatology* 5 (October 1, 2014). <https://doi.org/10.3402/ejpt.v5.25338>.
- Stempleman, Lara M, Dustin E Wright, and Kathryn A Bottonari. "Socioeconomic Status: Risks and Resilience BT - Determinants of Minority Mental Health and Wellness." edited by Sana Loue and Martha Sajatovic, 1–30. New York, NY: Springer New York, 2009. https://doi.org/10.1007/978-0-387-75659-2_13.
- Suhaeni, Heni. "Tipologi Kawasan Perumahan Dengan Kepadatan Penduduk Tinggi Dan Penanganannya." *Jurnal Permukiman* 5, no. 3 (2010): 116.

<https://doi.org/10.31815/jp.2010.5.116-123>.

- Sukmaniar, A J Pitoyo, and A Kurniawan. "Deviant Behaviour in the Slum Community of Palembang City." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 683, no. 1 (2021): 12129. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012129>.
- . "Vulnerability of Economic Resilience of Slum Settlements in the City of Palembang." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 451, no. 1 (2020): 12106. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/451/1/012106>.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, Kristi Yuliani, and Muammar Yuliana. "The Responsiveness and the Ability of 'Kampung Tangguh Bencana' in Handling Flood in Yogyakarta City." *The Indonesian Journal of Planning and Development* 2, no. 2 (2017): 94. <https://doi.org/10.14710/ijpd.2.2.94-107>.
- Tukino. "Pekerjaan Sosial Dalam Setting Kebencanaan." *Share* 3, no. 2 (2013).
- Wagnild, Gail M, and Heather M Young. "Development and Psychometric Evaluation of the Resilience Scale." *Journal of Nursing Measurement* 1 2 (1993): 165–78. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:3634658>.
- Wahyu Saputra, Sukmaniar, and Muhammad Hapiz Hermansyah. "Permukiman Kumuh Perkotaan: Penyebab, Dampak Dan Solusi." *Environmental Science Journal (Esjo) : Jurnal Ilmu Lingkungan* 1, no. 1 (2022): 12–17. <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929>.
- Wisner, Ben, Piers Blaikie, Terry Cannon, and Ian Davis. *At Risk: Natural Hazards, Peoples Vulnerability and Disasters*. At Risk: Natural Hazards Peoples Vulnerability and Disasters, 2003. <https://doi.org/10.4324/9780203714775>.
- World Bank. *Social Protection Strategy: From Safety Net to Springboard. The Summer of Her Baldness*. Washington, D.C., 2001. <https://doi.org/10.7560/702561-009>.

Wawancara

2. Sutaryo, (Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan), 29 April 2025.
3. Dal Sugiarmo, (Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan, dan Ketenteraman), 30 April 2025.
4. Didit, (Ketua Kampung Tangguh Bencana Ngampilan), 7 Mei 2025.
5. Ibnu Hajar, (BPBD Kota Yogyakarta), 8 Mei 2025.
6. Atika, (Sekretaris RW 01), 10 Mei 2025.
7. Sarijo, (Warga RT 02, RW 01), 24 Mei 2025